



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI YANDRA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 667309

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.280.000.000

1. Tanah Seluas 10200 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA LHOKSEUMAWE , HASIL SENDIRI Rp. 1.720.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4588 m2/4588 m2 di KAB / KOTA KOTA LHOKSEUMAWE , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA LHOKSEUMAWE , WARISAN Rp. 1.270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 722.500.000

1. MOBIL, HONDA/HRV MINIBUS PENUMPANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY F1C02N28L0 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOBIL, TOYOTA LANDCRUSER Tahun 1971, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. MOBIL, DODGE DODGE Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 305.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.312.500.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.312.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.